

MASA DEPAN SISTEM POLITIK INDONESIA: TANTANGAN DEMOKRASI DI TENGAH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Nizar Aglani Mauludin¹, Achmad Fauzan Kusnaedi², Regita Melani Putri³, Aos Kuswandi

¹²³ Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Komputer Indonesia, Kota Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2026

Revised Juli 2026

Accepted Juli 2026

Available Juli 2026

[emailpenulis](#)

nizaraglani1@gmail.com

fauzan.ksd06@gmail.com

regitamelaniputri07@gmail.com

[m](#)

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar terhadap sistem politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemanfaatan internet, media sosial, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), serta berbagai platform telah mengubah partisipasi politik, partisipasi masyarakat, kampanye politik, hingga proses pengambilan kebijakan publik. Di satu sisi, perkembangan teknologi memberikan peluang untuk memperkuat demokrasi melalui peningkatan transparansi pemerintahan, perluasan akses informasi, percepatan pelayanan publik berbasis digital, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai tantangan, seperti penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, polarisasi politik, manipulasi opini publik, pelanggaran privasi data, serta ancaman terhadap keamanan siber yang berpotensi melemahkan kualitas demokrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masa depan sistem politik Indonesia di tengah perkembangan teknologi informasi serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga kualitas demokrasi digital. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) melalui analisis berbagai jurnal ilmiah, buku, dan literatur yang relevan mengenai demokrasi digital, cyberpolitics, perkembangan teknologi informasi, dan sistem politik Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi tidak hanya mengubah cara masyarakat memperoleh informasi politik, tetapi juga mengubah pola interaksi antara pemerintah, aktor politik, dan warga negara. Digitalisasi telah menciptakan ruang partisipasi politik yang lebih luas, namun tanpa diimbangi literasi digital, regulasi yang adaptif, serta penguatan etika bermedia, perkembangan teknologi justru berpotensi memperbesar konflik sosial dan menurunkan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, masa depan sistem politik Indonesia memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, media, akademisi, serta masyarakat dalam membangun ekosistem demokrasi digital yang transparan, inklusif, aman, dan bertanggung jawab sehingga kemajuan teknologi dapat menjadi instrumen penguatan demokrasi, bukan sebaliknya.

Kata Kunci: *Sistem Politik Indonesia, Demokrasi Digital, Teknologi Informasi, Cyberpolitics, Partisipasi Politik.*

The development of information technology has brought significant changes to political systems in various countries, including Indonesia. The use of the internet, social media, artificial intelligence (AI), and various platforms has transformed political participation, public engagement, political campaigns, and even the public policy-making process. On the one hand, technological developments provide opportunities to strengthen democracy by increasing government transparency, expanding access to information, accelerating digital-based public services, and increasing public participation in political life. However, on the other hand, these developments also give rise to various challenges, such as the spread of hoaxes, disinformation, hate speech, political polarization, manipulation of public opinion, data privacy violations, and cybersecurity threats that have the potential to undermine the quality of democracy.

This research aims to analyze the future of Indonesia's political system amidst the development of information technology and identify the opportunities and challenges faced in maintaining the quality of digital democracy. The research uses a qualitative method with a library research approach through analysis of various scientific journals, books, and relevant literature on digital democracy, cyberpolitics, the development of information technology, and the Indonesian political system.

The research findings show that advances in information technology have not only transformed the way people obtain political information but also altered patterns of interaction between the government, political actors, and citizens. Digitalization has created a broader space for political participation, but without balanced digital literacy, adaptive regulations, and strengthening media ethics, technological developments have the potential to exacerbate social conflict and undermine the quality of democracy. Therefore, the future of Indonesia's political system requires collaboration between the government, election management bodies, the media, academics, and the public in building a transparent, inclusive, secure, and accountable digital democracy ecosystem so that technological advancements can become an instrument for strengthening democracy, not the other way around.

Keywords: *Indonesian Political System, Digital Democracy, Information Technology, Cyberpolitics, Political Participation.*

1. PENDAHULUAN

Pendahuluan: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi suatu faktor utama yang mendorong perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang politik dan demokrasi. Kemajuan internet, media sosial, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), big data, hingga platform digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, berinteraksi dengan pemerintah, serta berpartisipasi dalam proses politik. Transformasi digital tersebut membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem politik Indonesia, yang kini semakin bergantung pada teknologi sebagai sarana komunikasi, penyebaran informasi, pelayanan publik, hingga pelaksanaan kampanye politik. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa teknologi tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, melainkan telah menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi. Hal ini sejalan dengan penelitian mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menyatakan bahwa kemajuan teknologi telah mengubah sistem komunikasi Indonesia menjadi lebih terbuka, cepat, dan efisien sehingga memengaruhi kehidupan sosial maupun politik masyarakat.

Indonesia sebagai negara demokrasi dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar menghadapi tantangan baru dalam menjaga kualitas demokrasi di era digital. Kehadiran media sosial memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi politik secara cepat, menyampaikan aspirasi, mengawasi jalannya pemerintahan, serta berpartisipasi dalam berbagai isu publik tanpa dibatasi ruang dan waktu. Di sisi lain, kemudahan tersebut juga membuka peluang munculnya berbagai persoalan, seperti penyebaran berita bohong (hoaks), disinformasi, ujaran kebencian, propaganda politik, hingga polarisasi masyarakat yang semakin tajam. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi memberikan dampak ganda terhadap demokrasi, yaitu sebagai peluang untuk memperkuat partisipasi politik sekaligus menjadi



tantangan yang dapat menurunkan kualitas demokrasi apabila tidak diimbangi dengan regulasi dan literasi digital yang memadai.

Perubahan sistem politik akibat perkembangan teknologi informasi juga terlihat dari semakin berkembangnya konsep demokrasi digital. Demokrasi tidak lagi hanya diwujudkan melalui mekanisme pemilu atau kegiatan politik konvensional, tetapi juga melalui ruang digital yang memungkinkan masyarakat berinteraksi secara langsung dengan pemerintah maupun aktor politik. Berbagai platform digital digunakan sebagai media penyampaian aspirasi, kampanye politik, pengawasan kebijakan publik, hingga pembentukan opini masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi telah memperluas ruang partisipasi politik sehingga hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih terbuka serta interaktif. Namun demikian, ruang digital juga menjadi tempat berkembangnya manipulasi informasi yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, penguatan demokrasi digital harus diimbangi dengan pembangunan budaya politik yang sehat, transparan, serta bertanggung jawab.

Selain membawa perubahan pada pola komunikasi politik, perkembangan teknologi informasi juga melahirkan konsep *cyberpolitics* atau politik siber. Konsep ini menjelaskan bahwa aktivitas politik kini tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan berlangsung secara intensif melalui ruang digital. Kampanye politik, pembentukan citra kandidat, penyebaran informasi, mobilisasi massa, hingga pembentukan opini publik banyak dilakukan melalui media sosial dan berbagai platform internet. Keberadaan ruang siber memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk ikut terlibat dalam proses politik, namun pada saat yang sama juga meningkatkan risiko penyalahgunaan teknologi, seperti manipulasi algoritma, penyebaran propaganda digital, penggunaan akun palsu (*bot*), serta serangan siber terhadap institusi negara. Fenomena tersebut menjadi tantangan baru yang harus dihadapi Indonesia dalam menjaga stabilitas politik sekaligus mempertahankan nilai-nilai demokrasi yang sehat.

Pemerintah Indonesia sendiri terus melakukan berbagai upaya transformasi digital melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) serta pengembangan berbagai layanan publik digital. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempercepat proses administrasi pemerintahan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan negara. Digitalisasi pelayanan publik hingga tingkat desa menjadi salah satu bentuk implementasi teknologi informasi yang bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Keberhasilan transformasi tersebut sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia.

Meskipun demikian, perkembangan teknologi informasi tidak selalu menghasilkan dampak positif. Kemudahan penyebaran informasi sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan konten provokatif, berita palsu, maupun informasi yang menyesatkan demi kepentingan politik tertentu. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik sosial, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, serta mengganggu stabilitas demokrasi. Selain itu, perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan teknologi analisis data juga memunculkan persoalan baru terkait perlindungan data pribadi, etika penggunaan teknologi, keamanan siber, hingga potensi manipulasi perilaku politik masyarakat melalui algoritma media sosial. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif agar perkembangan teknologi tetap berada dalam koridor demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, keadilan, serta perlindungan hak-hak warga negara.

Melihat berbagai perkembangan tersebut, masa depan sistem politik Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah, lembaga negara, penyelenggara pemilu, media massa, akademisi, serta masyarakat dalam mengelola perkembangan teknologi informasi secara bijaksana. Penguatan literasi digital, peningkatan keamanan siber, penyempurnaan regulasi mengenai ruang digital, serta pengawasan terhadap penyebaran informasi menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas demokrasi di era digital. Dengan demikian, teknologi informasi tidak hanya menjadi sarana modernisasi pemerintahan, tetapi juga



menjadi instrumen yang mampu memperkuat partisipasi politik, meningkatkan transparansi, serta menciptakan sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perkembangan teknologi informasi memengaruhi masa depan sistem politik Indonesia, mengidentifikasi berbagai tantangan demokrasi yang muncul di era digital, serta merumuskan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat demokrasi Indonesia agar tetap mampu berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Politik Indonesia

Menurut (Wiryany et al., 2022) Sistem politik merupakan keseluruhan mekanisme yang mengatur hubungan antara lembaga negara, pemerintah, masyarakat, serta berbagai aktor politik dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, sistem politik diselenggarakan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan terhadap cara sistem politik bekerja, terutama dalam proses komunikasi politik, pelayanan publik, penyampaian aspirasi masyarakat, hingga pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Kemajuan teknologi informasi menjadikan hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin terbuka. Informasi mengenai kebijakan pemerintah dapat diakses dengan cepat melalui media digital, sementara masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk memberikan kritik, saran, maupun pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian, teknologi informasi menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan sistem politik modern di Indonesia.

B. Demokrasi Digital

Menurut (Badrin, 2018) Demokrasi digital merupakan perkembangan konsep demokrasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan internet sebagai sarana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Melalui demokrasi digital, masyarakat tidak hanya berpartisipasi pada saat pemilihan umum, tetapi juga dapat terlibat dalam penyampaian aspirasi, pengawasan kebijakan publik, diskusi politik, hingga penyebaran informasi melalui berbagai platform digital.

Pemanfaatan media sosial, website pemerintah, maupun aplikasi pelayanan publik telah memperluas akses masyarakat terhadap informasi politik. Namun demikian, demokrasi digital juga menghadirkan tantangan berupa meningkatnya penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, polarisasi politik, serta rendahnya literasi digital sebagian masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan demokrasi digital sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab serta didukung oleh regulasi yang memadai.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Sistem Politik

Menurut (Mukhsin, 2020) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan seperangkat teknologi yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, menyimpan, serta menyebarkan informasi melalui berbagai media digital. Dalam konteks pemerintahan, TIK berperan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempercepat komunikasi pemerintahan, meningkatkan transparansi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.

Perkembangan TIK juga mendorong lahirnya berbagai inovasi pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) yang memungkinkan masyarakat memperoleh pelayanan secara daring tanpa harus datang langsung ke instansi pemerintah. Selain meningkatkan efisiensi birokrasi, penerapan teknologi informasi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah melalui keterbukaan informasi publik. Meskipun demikian, penerapan TIK masih menghadapi berbagai kendala seperti kesenjangan infrastruktur digital, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum meratanya akses internet di seluruh wilayah Indonesia.

D. Cyberpolitics (Politik Siber)



Menurut (Indrawan, 2019) Cyberpolitics merupakan konsep yang menjelaskan aktivitas politik yang berlangsung di ruang siber melalui pemanfaatan internet dan media digital. Aktivitas tersebut meliputi kampanye politik digital, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, pembentukan opini publik, mobilisasi dukungan politik, hingga penyebaran informasi politik secara cepat melalui media sosial.

Perkembangan cyberpolitics telah mengubah strategi komunikasi politik dari metode konvensional menjadi komunikasi berbasis digital yang lebih interaktif. Namun demikian, ruang siber juga membuka peluang munculnya ancaman berupa propaganda digital, manipulasi informasi, penggunaan akun otomatis (*bot*), serangan siber terhadap lembaga negara, hingga penyalahgunaan data pribadi masyarakat untuk kepentingan politik. Oleh sebab itu, penguatan keamanan siber serta peningkatan literasi digital menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas demokrasi di era digital.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Penelitian mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjelaskan bahwa kemajuan teknologi telah mengubah pola komunikasi masyarakat menjadi lebih terbuka, cepat, dan efisien sehingga turut memengaruhi sistem politik nasional.

Penelitian mengenai demokrasi digital menyimpulkan bahwa teknologi memberikan peluang besar untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, namun juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran disinformasi dan polarisasi politik apabila tidak diimbangi dengan literasi digital yang baik.

Selanjutnya, penelitian mengenai ketahanan nasional di era demokrasi digital menegaskan bahwa penguatan regulasi, peningkatan keamanan siber, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas sistem politik Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk masa depan sistem politik Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai peluang dan tantangan demokrasi Indonesia di tengah perkembangan teknologi informasi, sekaligus memberikan gambaran mengenai strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat kualitas demokrasi pada masa mendatang. (Dan et al., 2017)

2. METODE

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis masa depan sistem politik Indonesia di tengah perkembangan teknologi informasi berdasarkan berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang diperoleh dari literatur ilmiah. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dan politik secara mendalam melalui analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan. Pendekatan ini juga sesuai dengan penelitian Wiryany, Natasha, dan Kurniawan (2022) yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam mengkaji perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap perubahan sistem komunikasi di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui berbagai literatur ilmiah, seperti jurnal nasional, artikel ilmiah, serta referensi akademik yang berkaitan dengan sistem politik Indonesia, demokrasi digital, teknologi informasi dan komunikasi, serta *cyberpolitics*. Adapun sumber utama penelitian ini terdiri atas lima jurnal, yaitu Demokrasi dan Demokrasi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan, Ketahanan Nasional Indonesia Bidang Politik di Era Demokrasi Digital, Cyberpolitics sebagai Perspektif Baru Memahami Politik di Era Siber, Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Perubahan Sistem Komunikasi Indonesia, dan Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi Menerapkan Sistem Informasi Desa dalam Publikasi Informasi Desa di Era Globalisasi. Pemilihan kelima jurnal tersebut didasarkan pada kesesuaian tema dengan fokus penelitian mengenai hubungan antara perkembangan teknologi informasi dan dinamika sistem politik



Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai dokumen ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Seluruh data kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, seperti perkembangan teknologi informasi, demokrasi digital, partisipasi politik, keamanan siber, serta tantangan dan peluang sistem politik Indonesia di era digital. Teknik dokumentasi dipilih karena mampu memberikan data yang komprehensif serta mendukung analisis terhadap fenomena yang sedang dikaji.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, interpretasi hasil kajian pustaka, dan penarikan kesimpulan. Setiap informasi yang diperoleh dari berbagai jurnal dibandingkan, dianalisis, kemudian disintesis untuk memperoleh gambaran mengenai peluang dan tantangan demokrasi Indonesia di tengah perkembangan teknologi informasi. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang objektif, sistematis, dan komprehensif mengenai masa depan sistem politik Indonesia dalam menghadapi era digital. Pendekatan analisis ini mengacu pada metode penelitian deskriptif kualitatif sebagaimana diterapkan dalam penelitian (Wiryany et al., 2022) serta didukung oleh penelitian (Mukhsin, 2020) mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemerintahan berbasis digital.

Perangkat lunak yang digunakan dalam proses analisis, apabila ada, sebaiknya disebutkan. Bagian metode penelitian hanya menjelaskan prosedur penelitian dan tidak diperkenankan memuat hasil analisis maupun pembahasan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan:

A. Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi terhadap Sistem Politik Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara penyelenggaraan sistem politik di Indonesia. Sebelum berkembangnya internet dan media digital, komunikasi politik lebih banyak dilakukan melalui media cetak, televisi, radio, maupun pertemuan secara langsung. Saat ini, perkembangan teknologi telah menciptakan ruang komunikasi politik yang lebih cepat, terbuka, dan interaktif melalui media sosial, portal berita daring, serta berbagai platform digital.

Perubahan tersebut memberikan dampak positif terhadap keterbukaan informasi publik karena masyarakat dapat mengakses berbagai informasi mengenai kebijakan pemerintah, proses legislasi, maupun aktivitas politik secara lebih mudah. Selain itu, pemerintah juga mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan transparan.

Menurut (Wiryany et al., 2022), perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah sistem komunikasi Indonesia menjadi lebih terbuka serta memberikan kemudahan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Perubahan tersebut secara langsung memengaruhi sistem sosial dan sistem politik karena komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi semakin cepat dan efisien.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi merupakan faktor penting dalam modernisasi sistem politik Indonesia. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efektivitas komunikasi politik, tetapi juga memperkuat transparansi pemerintahan serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik.

B. Peluang Demokrasi Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan konsep demokrasi digital (*digital democracy*), yaitu sistem demokrasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Melalui media sosial, website pemerintah, aplikasi pelayanan publik, hingga forum



diskusi daring, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, maupun mengikuti berbagai proses politik secara lebih mudah.

Demokrasi digital juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi politik secara cepat tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kampanye politik, pendidikan politik, debat publik, maupun penyampaian program pemerintah kini dapat dilakukan secara daring sehingga jangkauan informasi menjadi lebih luas dibandingkan sebelumnya.

Berdasarkan penelitian mengenai *Demokrasi dan Demokrasi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan*, perkembangan teknologi digital telah memperluas partisipasi politik masyarakat sekaligus meningkatkan transparansi pemerintahan. Namun demikian, keberhasilan demokrasi digital sangat bergantung pada tingkat literasi digital masyarakat serta kemampuan pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab.

Selain itu, penelitian mengenai *Ketahanan Nasional Indonesia Bidang Politik di Era Demokrasi Digital* menjelaskan bahwa demokrasi digital dapat memperkuat ketahanan politik nasional apabila didukung oleh regulasi yang adaptif, keamanan siber yang memadai, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan penyelenggara pemilu dalam menjaga kualitas demokrasi.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia melalui perluasan partisipasi masyarakat, peningkatan transparansi pemerintahan, dan kemudahan akses terhadap informasi politik.

C. Tantangan Demokrasi di Tengah Perkembangan Teknologi Informasi

Di balik berbagai manfaat yang diberikan oleh perkembangan teknologi informasi, terdapat berbagai tantangan yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Salah satu tantangan terbesar adalah penyebaran berita bohong (*hoaks*), disinformasi, ujaran kebencian, propaganda politik, serta meningkatnya polarisasi masyarakat akibat penyalahgunaan media sosial.

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), algoritma media sosial, dan analisis data juga memungkinkan terjadinya manipulasi opini publik melalui penyebaran informasi yang disesuaikan dengan preferensi pengguna. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi perilaku politik masyarakat dan menurunkan kualitas proses demokrasi apabila tidak diimbangi dengan regulasi yang memadai.

Menurut penelitian (Indrawan, 2019) *sebagai Perspektif Baru Memahami Politik di Era Siber*, ruang siber telah menjadi arena baru dalam aktivitas politik sehingga berbagai bentuk kampanye, mobilisasi massa, hingga pembentukan opini publik banyak dilakukan melalui media digital. Namun, ruang digital juga membuka peluang terjadinya propaganda politik, penyebaran informasi palsu, serangan siber, serta penyalahgunaan data pribadi masyarakat.

Sementara itu, penelitian (Wirany et al., 2022) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat menjadi lebih terbuka. Akan tetapi, keterbukaan tersebut juga menyebabkan arus informasi menjadi sulit dikendalikan sehingga meningkatkan risiko penyebaran informasi yang tidak akurat.

Oleh karena itu, peningkatan literasi digital, penguatan keamanan siber, serta penegakan regulasi terhadap penyalahgunaan teknologi informasi menjadi langkah yang sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

D. Masa Depan Sistem Politik Indonesia di Era Digital

Masa depan sistem politik Indonesia diperkirakan akan semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Digitalisasi pemerintahan, penggunaan kecerdasan buatan dalam pelayanan publik, pengembangan *e-government*, serta pemanfaatan *big data* diperkirakan akan meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan di masa mendatang.

Namun demikian, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, kualitas regulasi, keamanan siber, serta pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan teknologi sehingga tidak terjadi kesenjangan digital.



Menurut (Mukhsin, 2020), penerapan teknologi informasi dalam sistem pemerintahan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mendukung proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan efisiensi organisasi. Namun keberhasilan implementasinya tetap bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi.

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai jurnal yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa masa depan sistem politik Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menjadi lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi. Akan tetapi, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah, masyarakat, akademisi, media massa, dan seluruh pemangku kepentingan mampu bekerja sama dalam meningkatkan literasi digital, memperkuat keamanan siber, menyempurnakan regulasi digital, serta menjaga etika komunikasi politik di ruang digital. Dengan demikian, perkembangan teknologi informasi tidak hanya menjadi sarana modernisasi pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan Saran: Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem politik Indonesia. Pemanfaatan internet, media sosial, dan berbagai platform digital telah mengubah pola komunikasi politik, meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, serta memperluas partisipasi publik dalam proses demokrasi. Digitalisasi juga mendorong pemerintah untuk mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai perubahan tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki peran strategis dalam mendukung modernisasi sistem politik Indonesia.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan berbagai tantangan bagi demokrasi Indonesia. Penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, polarisasi politik, penyalahgunaan data pribadi, serta ancaman keamanan siber menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

Selain itu, perkembangan *cyberpolitics* menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi arena baru dalam aktivitas politik yang memerlukan pengawasan, regulasi, dan etika komunikasi yang lebih baik agar tidak menurunkan kualitas demokrasi.

Oleh karena itu, peningkatan literasi digital, penguatan keamanan siber, serta penyempurnaan regulasi mengenai pemanfaatan teknologi informasi menjadi langkah yang penting untuk menjaga stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa masa depan sistem politik Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam memanfaatkan teknologi informasi secara bertanggung jawab.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, akademisi, media massa, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan ekosistem demokrasi digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan dukungan kebijakan yang adaptif, pemerataan infrastruktur digital, serta peningkatan literasi digital masyarakat, perkembangan teknologi informasi dapat menjadi instrumen untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan partisipasi politik, serta mewujudkan sistem politik Indonesia yang lebih transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik.



Saran: Berdasarkan hasil penelitian mengenai masa depan sistem politik dan tantangan demokrasi di era digital, saran penanganan dapat diintegrasikan ke dalam langkah kolaboratif antar-pemangku kepentingan. Pemerintah bersama lembaga negara perlu memperkuat regulasi ruang digital yang adaptif, menegakkan keamanan siber, melindungi data pribadi, serta mempercepat pemerataan infrastruktur digital hingga ke seluruh wilayah. Di sisi lain, penyelenggara pemilu, aktor politik, lembaga pendidikan, akademisi, dan media massa harus bersinergi menggalakkan literasi digital secara masif serta memanfaatkan cyberpolitics secara etis untuk mengedukasi publik dan meredam polarisasi. Pada akhirnya, masyarakat sebagai warga negara dituntut untuk berpartisipasi secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menyaring informasi, sehingga kolaborasi lintas sektor ini mampu mengarahkan teknologi informasi sebagai instrumen penguatan kualitas demokrasi Indonesia yang berkelanjutan.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Badrun, U. (2018). Ketahanan Nasional Indonesia Bidang Politik Di Era Demokrasi Digital (Tantangan Tahun Politik 2018-2019 dan Antisipasinya). *Jurnal Lemhannas RI*, 6(1), 21–36.
<https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/113>
- Dan, D., Digital, D., Indonesia, D. I., & Dan, P. (2017). Sardini_2017. *Waste Management*, 68, XXX.
[https://doi.org/10.1016/s0956-053x\(17\)30669-4](https://doi.org/10.1016/s0956-053x(17)30669-4)
- Indrawan, J. (2019). 2.5. Cyberpolitics sebagai Perspektif Baru Memahami Politik di Era Siber. *Politica*, 10(1), 1–15. <http://www.ericsson.com/>
- Mukhsin. (2020). [1]_Admin-2. *Teknokom*, 3(1), 7–15.
- Wirany, D., Natasha, S., & Kurniawan, R. (2022). Komunikasi Terhadap Perubahan Sistem Komunikasi Indonesia. *Jurnal Nomosleca*, 8(November), 242–252.
<https://pdfs.semanticscholar.org/6dad/24ab1ed2ba0006f68e14f87bab13c4ef10a6.pdf>